

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amin, Fakhry, Dkk, *Ilmu Perundang-Undangan*, Jakarta: Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Diantha, I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Effendi, Jonaedi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Firdaus, Syam, *Rancangan Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2009.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Penamedia Group, 2014.
- , *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Penamedia Group, 2014.
- Juniarso Ridwan, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Nuansa Cendikia, 2019.
- Khairandy, Ridwan, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jogja: FH UII Press, 2013.
- Rusli, Tami, dan Zulfi Diane Zaini, *Sistem Badan Hukum Indonesia*, Lampung: Publikasi Universitas Bandar Lampung, 2019.
- Soerjono *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1976.

Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Jurnal Penelitian :

Akbar, Ali, “Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah Dusturiyah Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia,” *Journal of Chemical Information and Modeling*, Volume 53, No 9, 2019.

Awaliyah, “Kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (KK/PKP2B).” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 27 No 2, 2024.

Azizah, Nur, Faiqah, “Konsep Penyalahgunaan Wewenang dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Sebagai Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Adalah*, Volume 6, No 4, 2022.

Darongke Friskilia, Dientje, Rumimpunu, dan Sarah Roeroe. “Efektivitas Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral di Indonesia.” *Jurnal Lex Privatum*, Volume 10, No 3, 2020.

Fitria, Agis, “Potensi penyimpangan izin usaha pertambangan ormas dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2024”. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Volume 4 No 11, 2024.

Fitria, Agis, “Potensi Penyimpangan Izin Usaha Pertambangan Ormas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024” *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Volume 4, No 11, 2023.

Hening, dan Saiful Bahri, “Karakteristik Islam dalam tata kelola lingkungan hidup: Studi kasus pemberian IUP

- pertambangan dan mineral kepada organisasi masyarakat keagamaan". *Jurnal Dirosah Islamiyah*, Volume 6, No 3, 2024.
- Hidayat, Rahmat, "Relevansi Konsep Siyasah Dusturiyah terhadap Tata Kelola Pemerintahan di Indonesia", *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Volume 10, No 2, 2020.
- Idrus, Mursyahid, Ahmad, "Kebijakan Pemimpin Negara dalam Perspektif Kaidah Fikih : Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah," Al-Daulah : *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Volume 10, No 2, 2021.
- Mubarak, Syahrul, dan Azman Arsyad, "Pembubaran Ormas Islam Oleh Pemerintah; Studi Komparatif Undang-Undang Ormas dan Hukum Islam," *Shautun Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Volume 2 No 3, 2021.
- Mutiara, Viorellia, dan Amanda, "Urgensi pemberian izin pengelolaan tambang bagi organisasi kemasyarakatan "keagamaan" di Indonesia: Analisis regulasi dalam PP Nomor 25 Tahun 2024". *Jurnal of Law and Syariah*, Volume 2, No 2, 2024.
- Nugroho, Yanuar, "Pertambangan dan Tata Kelola: Antara Peluang dan Kepentingan Ormas." *Jurnal Politik dan Kebijakan Publik*, Volume 12, No 1, 2024.
- Putri, Zaffrinda, Rizkyana, Dan Lita Tyesta, "Kajian Politik Hukum Tentang Perubahan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara," *Law Reform*, Volume 11, No 2, 2015.
- Prastika, Amanda, Mutiara Fajriatul Izza Putri, dan Viorelia Nabila Tasya, "Urgensi Pemberian Izin Pengelolaan Tambang bagi Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan di Indonesia: Analisis Regulasi dalam PP Nomor 25 Tahun 2024." *Tarunalaw : Journal Of Law And Syariah*, Volume 2, No 2, 2024.

- Pramono, Indra, Widhan, Dan Adis Imam Munandar, "Peran Undang-Undang Ormas Terhadap Penyelesaian Konflik Antar Ormas," *Jurnal Ilmiah Living Law*, Volume 12, No 1, 2020.
- Prianto, Wahyu, "Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky," *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Volume 2, No 1, 2024.
- Redi, Ahmad, dan Luthfi Marfungah, "Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia," *Jurnal Hukum*, Volume 4 No 2, 2023.
- Risano, Alfredo. "Urgensi Pemberian Izin Pengelolaan Tambang bagi Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan di Indonesia: Analisis Regulasi dalam PP Nomor 25 Tahun 2024" *Jurnal Independent* Volume 8, No 2, 2020.
- Rivaldo, Edwar, Dan Hervin Yoki Pradikta, "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading In Influence dalam Hukum Positif di Indonesia," *As- Siyasi: Journal Of Constitutional Law*, Volume 1, No 1, 2021.
- Suhenriko, Muhammad, "Implementasi Teori Hierarki Hans Kelsen Terhadap Perumusan Kebijakan di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Multidisipin*, Volume 1, No 2, 2023.
- Susanti, Bivitri, "Menyoal Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Jentera: Jurnal Hukum*, Volume 1, No 2, 2017.
- Surya, dan Suryawan, "Pelibatan Ormas Keagamaan Dalam Mengelola Tambang," *Jurnal Info Singkat Kajian DPR RI*, Volume 18, No 15, 2024.
- Tandika, Fitria, Sadino, dan Yusup Hidayat, "Peluang Ormas Keagamaan Mengelola Tambang di Indonesia Pasca

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024,” *Lex Jurnalica*, Volume 21, No 3. 2024.

Wiseha, Pramudya, “Integrasi Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Sumber Daya: Studi Kritis Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah,” *Jurnal Geocivic*, Volume 7, No 2, 2024.

Wijayanti, Dwi, Samsul Munir, dan Nurul Syalafiyah, “Tinjauan Hukum Siyasah terhadap Kebijakan Publik dalam Penanganan Lingkungan Hidup,” *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, Volume 9, No 2, 2024.

Yohana, “Tanggung Jawab Hukum Atas Bentuk Usaha Badan Hukum dan Bentuk Usaha Non Badan Hukum,” *Jurnal Mercatoria*, Volume 8, No 1, 2015.

Skripsi/Tesis/Disertasi:

Atika, Nur, Devi, Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Kaidah ‘Tassarruf Al- Imam ‘Ala Al-Ra’iyyah Manutun Bi Al-Maslahah’ Pada Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 0167/Pdt.P/2018/Pa.Bjn Tentang Pemberian Dispensasi Nikah, Skripsi S1 UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Daika, Hyang, Feri, Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan dalam Kawasan Hutan di Kabupaten Ketapang - Kalimantan Barat (Studi Kasus di Kecamatan Kendawangan dan Kecamatan Jelai Hulu), Skripsi S1 Fakultas Hukum Unika Soegijapranata, 2011.

Habibi Muhammad, Dinamika Pengaturan Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia, Skripsi S1 Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2019.

- Haris, Oheo, Maladministrasi dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan yang Berimplikasi Tindak Pidana, Tesis S2 Universitas Airlangga, 2015.
- Kusumastuti, Renggani, Tanggung Jawab Para Sekutu dalam *Commanditaire Venootschap* yang Akan Menjadi Perseroan Terbatas (Studi Kasus CV Bintang Jaya di Klaten), Thesis Sebelas Maret University, 2016.
- Meyliza, Tera, Kajian Siyasah Tanfidziyah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2039 (Studi Hutan Mangrove Pulau Baai di Kota Bengkulu, Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2024.
- Mukti, Alan, Tinjauan Yuridis dan Siyasah Dusturiyah atas Desentralisasi Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Kepada Pemerintah Provinsi, Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Bengkulu, 2021.
- Nurkholbi, Dimas, Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Tesis S2 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Sarifuddin, Imam, Tinjauan Yuridis Pembubaran Ormas dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam Konsep Negara Hukum, Skripsi S1 Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Tansa, Fala, Ahmad, Otoritas Presiden dalam Menerbitkan Perppu Menurut Fiqih Siyasah, Skripsi S1 Fakultas

Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,
2018.

Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Pasal 33 Ayat (3) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 75 ayat (3) Undang Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Pasal 83 Huruf (A) Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.